



COMMUNITY-BASED TOURISM MODEL

Strategi Pemberdayaan UMKM dan Pembangunan
Infrastruktur untuk Pariwisata Berkelanjutan

Dr. Heffi Christya Rahayu, M.Si.

Dr. Hardianto, M.Pd.

Prof. Dr. Etty Puji Lestari, M.Si.

Febiana Gitya, SE.

Hidayat, SE., MM.

Luth Fimawahib, M.Com.

Nofriser, S.Sos., MM.

Sischa Febriani Yamesa Away, S.Tr.P., M.App.Sc.

Susanti, SE., M.Ak



COMMUNITY-BASED TOURISM MODEL
Strategi Pemberdayaan UMKM dan Pembangunan Infrastruktur
untuk Pariwisata Berkelanjutan

Dr. Heffi Christya Rahayu, M.Si.
Dr. Hardianto, M.Pd.
Prof. Dr. Etty Puji Lestari, M.Si.
Febiana Gitya, SE.
Hidayat, SE., MM.
Luth Fimawahib, M.Com.
Nofriser, S.Sos., MM.
Sischa Febriani Yamesa Away, S.Tr.P., M.App.Sc.
Susanti, SE., M.Ak



CV. Dəlni Bintang

COMMUNITY-BASED TOURISM MODEL
Strategi Pemberdayaan UMKM dan Pembangunan Infrastruktur
untuk Pariwisata Berkelanjutan

ISBN: 978-634-96051-1-3

Penulis

Dr. Heffi Christya Rahayu, M.Si.

Dr. Hardianto, M.Pd.

Prof. Dr. Etty Puji Lestari, M.Si.

Febiana Gitya, SE.

Hidayat, SE., MM.

Luth Fimawahib, M.Com.

Nofriser, S.Sos, MM.

Sischa Febriani Yamesa Away, S.Tr.P., M.App.Sc.

Susanti, SE., M.Ak.

Desain Sampul

Canva by Dalni Bintang Team

Layout dan Editor

Annajmi

Cetakan: pertama, Juni 2025

Diterbitkan Oleh

CV. Dalni Bintang

(Anggota IKAPI Nomor:013/RAU/2022)

Jl. Cempaka Petakur Atas, Ujungbatu

Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau

<https://dalnibintangpublisher.com/>

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan buku berjudul ***“Community-Based Tourism Model: Strategi Pemberdayaan UMKM dan Pembangunan Infrastruktur untuk Pariwisata Berkelanjutan”*** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bagian dari kontribusi pemikiran dalam mendalami dan menganalisis strategi pemberdayaan UMKM serta pengembangan infrastruktur dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT).

Penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami tim penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik melalui diskusi masukan akademis maupun dukungan moral dalam proses penyusunan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan UMKM, serta dapat membangun infrastruktur berbasis komunitas. Selain itu diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Rokanhulu, Juni 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I 8

Pariwisata dan UMKM Berkelanjutan 8

1.1 Potensi Pengembangan Desa Wisata..... 8

1.2 Potensi dan Peran UMKM 10

1.2 Fokus Masalah Pengembangan Desa Wisata 12

1.3 Tujuan Strategi Pengembangan Desa Wisata..... 13

BAB II..... 14

Landasan Konseptual: UMKM, Infrastruktur, dan Pariwisata Berbasis Komunitas 14

2.1 Makna dan Pendekatan Pemberdayaan 14

 2.1.1 Pengertian Pemberdayaan..... 14

 2.1.2 Tujuan Pemberdayaan 16

 2.1.3 Pendekatan Pemberdayaan 18

2.2 Konsep dan Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah 19

 2.2.2 Ciri-ciri UMKM 20

 2.2.3 Pemberdayaan UMKM..... 21

2.3 Infrastruktur sebagai Aksesibilitas dan Pertumbuhan Wisata 23

 2.3.1 Pengertian Infrastruktur 23

 2.3.2 Pengembangan Infrastruktur..... 24

2.4 Prinsip-Prinsip Pariwisata Berkelanjutan 25

2.5 Kebaharuan Strategi: Sinergi CBT dan *Circular Economy*..... 26

BAB III 28

Pendekatan *Community-Based Tourism* Dalam Pengembangan *Sustainable Tourism*..... 28

3.1 Pendekatan Pemecahan Masalah 28

3.2 Pendekatan *Community-Based Tourism* 28

3.3 Kerangka Kajian Lapangan dan Strategi Pengumpulan Informasi.....	31
3.4 Alur Analisa dan Pengambilan Keputusan	33
BAB IV	40
Analisis Lapangan dan Temuan Strategis	40
4.1 Potensi dan Sumber Daya Pariwisata Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya	41
4.2 Infrastruktur dan Community Based Tourism.....	42
4.3 <i>Community Based Tourism</i> dalam Pemberdayaan UMKM	44
4.4 Kebijakan Prioritas dalam Pengembangan Pariwisata Perairan	45
BAB V	60
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Wisata Berbasis Komunitas..	60
5.1 Pengembangan Infrastruktur Wisata yang Inklusif	60
5.2 Penguatan UMKM dan Kewirausahaan Lokal.....	61
5.3 Keterlibatan Multistakeholder dalam Pengelolaan Destinasi.....	62
5.4 Roadmap Menuju Pariwisata Berbasis Komunitas Berkelanjutan	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perhitungan PCM Sebelum Ternormalisasi 47

Tabel 4. 2 Perhitungan PCM Sesudah Ternormalisasi dan Perhitungan Bobot
Prioritas 48

Tabel 4. 3 *Squaring the Matrix* 48

Tabel 4. 4 Bobot Prioritas Kriteria 49

Tabel 4. 5 Bobot Prioritas Alternatif 50

Tabel 4. 6 Bobot Prioritas Global..... 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi 9

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian..... 33

Gambar 3. 2 Langkah-Langkah AHP 35

Gambar 3. 3 Struktur Hierarki Penelitian..... 37

Gambar 4. 1 Bagan Hirarki Persoalan..... 47

Gambar 4. 2 Diagram Prioritas Kriteria 49

Gambar 4. 3 Diagram Prioritas Alternatif..... 51

Gambar 4. 4 Peta Persebaran Lokasi Wisata..... 56

Gambar 4. 5 Visualisasi Data Aerial 57

Gambar 4. 6 Visualisasi Data Aerial 57

Gambar 4. 7 Visualisasi Data Aerial 58

Gambar 4. 8 Visualisasi Data Aerial 58

Gambar 4. 9 Visualisasi Data Aerial 59

BAB I

Pariwisata dan UMKM Berkelanjutan

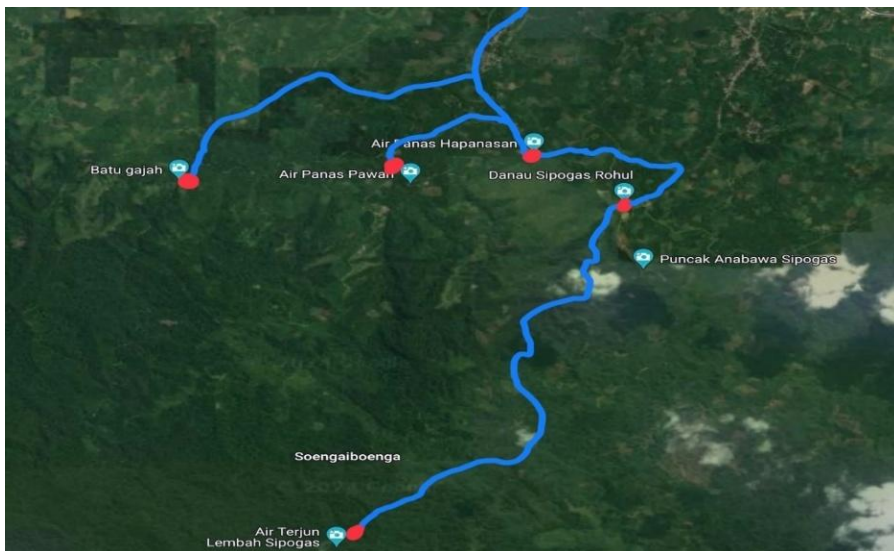
1.1 Potensi Pengembangan Desa Wisata

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional, karena mampu menggerakkan berbagai sektor pendukung secara simultan tanpa harus mengeksploitasi sumber daya alam secara langsung. Namun, keberhasilan pembangunan pariwisata sangat dipengaruhi oleh keberadaan infrastruktur pendukung serta keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan berkelanjutan

Sektor pariwisata merupakan andalan devisa negara terbesar karena penggunaannya tidak mengonsumsi sumber daya alam tetapi memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Dalam memilih destinasi, wisatawan selalu memperhatikan potensi dan daya tarik yang ditawarkan dengan keunikannya (Ratwianingsih L et al., 2021). Di Pasir Pengaraian terdapat sejumlah desa yang memiliki potensi wisata diantaranya Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya. Desa Pawan memiliki beberapa destinasi wisata berbasis perairan seperti Air Panas Hapanasan, Air Panas Suaman, dan Batu Gajah (Putri CS et al., 2020). Selanjutnya, Air Terjun Sipogas dan Danau Sipogas merupakan destinasi yang terletak di Desa Sialang Jaya.

Air Panas Hapanasan merupakan wisata yang telah dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Pada wisata ini terdapat beberapa wahana jembatan gantung, rumah pohon, dan arena panjat tebing. Di sisi lain, Air Panas Suaman merupakan destinasi dikelola oleh

masyarakat dengan aliran sungai menjadi daya tarik utamanya. Sebagai sumber pendapatan, masyarakat sekitar memanfaatkan wisata ini dengan usaha seperti sewa balon air serta menjual makanan ringan. Selain sebagai destinasi wisata, Air Panas Suaman juga dikenal memiliki sarana terapi air yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit oleh masyarakat. Namun, aliran sungai pada destinasi ini kerap dijadikan sebagai tempat pencucian hasil panen karet yang kemudian menimbulkan eksternalitas negatif (Angelina, 2019). Batu Gajah merupakan wisata berbasis perairan lainnya yang ada di Desa Pawan dengan daya tarik utama berupa aliran sungai berwarna hijau jernih yang dikelilingi hutan alam.



Gambar 1. 1 Lokasi

Wisata ini, belum dikelola dengan baik oleh masyarakat atau pemerintah daerah. Selanjutnya Danau Sibogas merupakan wisata danau yang terletak di Desa Sialang Jaya. Dulunya, wisata ini memiliki sejumlah wahana seperti *speed boat* dan bebek sepeda air. Namun, kurangnya pemeliharaan baik dari pemerintah ataupun masyarakat menyebabkan penurunan kualitas fasilitas wisata tersebut. Tidak jauh

dari Danau Sibogas, terdapat wisata Air Terjun Sipogas yang belum dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini menurunkan minat masyarakat terhadap wisata tersebut.

Terlepas dari sejumlah daya tariknya, wisata di Kota Pasir Pengaraian memiliki infrastruktur yang masih lemah. Jalan yang terbuat dari tanah liat memberikan hambatan dalam aksesibilitas masyarakat untuk mencapai beberapa destinasi wisata. Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya merupakan dua kawasan yang menyimpan potensi besar dalam pengembangan wisata perairan. Sayangnya, potensi ini belum dikelola secara optimal karena keterbatasan infrastruktur dan rendahnya daya dukung UMKM lokal. Melalui pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT), pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat serta peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis komunitas.

Community-Based Tourism (CBT) adalah pendekatan pengelolaan pariwisata yang mengutamakan keterlibatan langsung dari masyarakat (Syarif et al., 2023). Model ini juga berfokus pada partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan sektor pariwisata, seperti keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pembagian manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat setempat (Piartrini Putu, 2018). Pariwisata yang berbasis masyarakat berperan penting dalam mewujudkan *Sustainable Tourism* (Dolezal C et al., 2020). Penerapan CBT dapat menjadi contoh dari keterlibatan masyarakat lokal untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

1.2 Potensi dan Peran UMKM

Pariwisata akan menciptakan beberapa alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya seperti UMKM (Indra Rina et

al., 2022) UMKM mampu melahirkan kreativitas untuk melestarikan dan mengembangkan unsur tradisional dan budaya masyarakat setempat (Cornellia, 2023). Namun, pada wisata di Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya, peran UMKM belum dimanfaatkan secara optimal. UMKM yang ada hanya sebatas menyediakan makanan ringan saja sehingga tidak dapat menjadi sumber ekonomi yang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi dalam pengembangan maupun pemasaran produk. Diperlukan upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal, dengan berfokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, sejumlah UMKM yang ada hanya terbatas pada penyewaan alat renang dan penjualan makanan ringan sehingga belum menunjukkan adanya *unique value* tertentu. Kemudian, kurangnya jumlah pengunjung serta daya beli yang rendah menjadi penyebab UMKM di sejumlah destinasi ini sulit berkembang.

CBT menawarkan solusi strategis dengan berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal dan mendorong pengembangan produk yang inovatif yang berakar pada kekhasan budaya setempat. Melalui model CBT, masyarakat lokal akan diberdayakan sehingga dapat menciptakan pengalaman wisata yang menjadi daya tarik dari Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya. Selain itu, infrastruktur merupakan faktor penting lainnya yang mendukung pariwisata sebagai langkah awal untuk menarik wisatawan (Febriandhika I et al., 2019). Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur agar nantinya setiap wisata alam yang ada di Pasir Pengaraian mampu meningkatkan pengalaman kunjungan dan menarik lebih banyak wisatawan (Hasanah M et al., 2023).

Dalam pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT), pengembangan infrastruktur yang inklusif dan ramah lingkungan menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, strategi pengembangan

UMKM dan identifikasi peran *stakeholder* akan dilakukan untuk mengurangi degradasi lingkungan dan mewujudkan *Sustainable Tourism*. Hal ini bertujuan agar tempat wisata alam yang ada dapat berkembang dan mengalami penambahan jumlah pengunjung (Pamularsih, 2021). Optimalisasi UMKM dan pembangunan infrastruktur pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan yang mewujudkan pariwisata prioritas berkelanjutan (Febriyantoro et al., 2018).

Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM dalam kegiatan wisata masih terbatas pada skala kecil dan konvensional. Di sisi lain, infrastruktur seperti akses jalan dan fasilitas umum belum sepenuhnya mendukung kenyamanan dan kemudahan akses wisatawan. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji strategi pemberdayaan UMKM dan penguatan infrastruktur berbasis pendekatan CBT guna mewujudkan *sustainable tourism* yang inklusif, partisipatif, dan berbasis keunggulan lokal.

1.2 Fokus Masalah Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan destinasi wisata di wilayah pedesaan kerap dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar. Di Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya, meskipun memiliki potensi alam yang kaya, keterbatasan infrastruktur dan lemahnya kapasitas pelaku UMKM lokal menjadi penghambat utama terwujudnya destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, peran masyarakat sebagai pelaku utama belum optimal, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengelolaan langsung aktivitas pariwisata.

Permasalahan juga muncul dari sisi koordinasi antar-pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha belum sepenuhnya terintegrasi dalam strategi pembangunan pariwisata

yang komprehensif. Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan kritis: Bagaimana memaksimalkan potensi pariwisata yang ada? Apa saja bentuk intervensi infrastruktur yang dibutuhkan? Bagaimana pendekatan CBT dapat memberdayakan UMKM secara lebih luas dan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Strategi Pengembangan Desa Wisata

Tujuan dari kajian ini tidak hanya untuk menghasilkan pemetaan kondisi eksisting pariwisata dan UMKM di Desa Pawan dan Sialang Jaya, tetapi juga untuk merumuskan strategi penguatan UMKM dan infrastruktur yang dapat diterapkan secara langsung dalam kerangka *Community-Based Tourism* (CBT). Tujuan utama dari kajian ini meliputi:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi serta kendala pengembangan desa wisata di Desa Pawan dan Sialang Jaya.
2. Merumuskan peran strategis infrastruktur dalam mendukung aksesibilitas, kenyamanan, dan daya tarik wisata untuk mewujudkan *sustainable tourism*.
3. Menganalisis kontribusi pendekatan CBT dalam meningkatkan kapasitas ekonomi lokal melalui UMKM.
4. Menghasilkan prioritas kebijakan pengembangan pariwisata berbasis komunitas dengan pendekatan analisis yang terukur dalam mewujudkan *sustainable tourism*.

BAB II

Landasan Konseptual: UMKM, Infrastruktur, dan Pariwisata Berbasis Komunitas

2.1 Makna dan Pendekatan Pemberdayaan

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan, yang berasal dari istilah bahasa Inggris "*empowerment*," secara harfiah berarti "pemberkuasaan," yaitu upaya memberikan atau meningkatkan kekuasaan kepada kelompok masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Menurut (Sulistiyani, 2004:7) menjelaskan bahwa "Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "berdaya" yang artinya memiliki atau mempunyai daya". Pendapat tersebut menjelaskan bahwa "daya" berarti kekuatan, dan "berdaya" berarti memiliki kekuatan. Namun, pengertian "*empowerment*" telah berkembang dalam berbagai referensi dan bidang, menghasilkan beragam pemahaman. Secara umum, "*empowerment*" diterjemahkan sebagai "pemberdayaan," yang berarti membuat sesuatu memiliki kekuatan atau daya. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto,2014:57).

Menurut Friedman (1992) mendefinisikan pemberdayaan sebagai pendekatan alternatif untuk mengembangkan inisiatif

masyarakat, di mana peran negara adalah menciptakan, memfasilitasi, dan mendukung kondisi yang memungkinkan. Sedangkan menurut Pranarka dan Moejato (1996), konsep pemberdayaan atau empowerment pada dasarnya adalah usaha untuk menciptakan lingkungan yang adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat yang diberdayakan.

Slamet dalam buku Anwas yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Era Global mengemukakan pendapatnya mengenai pemberdayaan sebagai berikut: “Bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif”. (Anwas, 2014:49). Pendapat tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan harus memungkinkan masyarakat yang diberdayakan untuk membangun diri dan memperbaiki kehidupan mereka secara mandiri. Mereka harus menjadi berdaya, memahami situasi, termotivasi, memiliki peluang, dapat melihat dan memanfaatkan kesempatan, energik, mampu bekerja sama, mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan bertindak sesuai dengan inisiatif. Semua ini adalah hasil dari pemberdayaan yang efektif, yang dapat tercapai jika proses pemberdayaan dilakukan secara maksimal sesuai harapan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab I (Pasal 1, No.8) menyatakan bahwa “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim, dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM agar tetap kuat dan mandiri. Penumbuhan iklim usaha, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, adalah kondisi yang diciptakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara terpadu melalui peraturan dan kebijakan di berbagai aspek ekonomi, sehingga UMKM mendapatkan dukungan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan kemudahan berusaha yang seluas-luasnya (Pasal 1 Nomor 9).

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Menurut (Hapsari, 2018) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, bukan ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Konsep pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM.

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Semua konsep pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mandiri.

Kesejahteraan yang ingin dicapai bertujuan untuk membangun masyarakat dengan martabat kemanusiaan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional. Setiap individu atau masyarakat memiliki keinginan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dengan memanfaatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, masyarakat yang dianggap lemah dan tidak berdaya dapat menjadi berdaya. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan harus berfokus pada manusia dan berakar pada kerakyatan melalui program atau kegiatan yang dapat membuat masyarakat lebih mandiri dan berdaya.

Tujuan pemberdayaan menurut pendapat Suharto dalam buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* mengatakan bahwa “Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya” (Suharto, 2014:60). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan mengacu pada hasil yang diharapkan dari perubahan sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang berdaya, dengan kekuasaan atau kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik dalam aspek ekonomi, fisik, maupun sosial. Ini mencakup kepercayaan diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, mata pencaharian, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta kemandirian dalam menjalankan berbagai tugas kehidupan yang harus dijalani.

Ambar Teguh Sulistiyani dalam bukunya *Kemitraan dan*

Model-Model Pemberdayaan menyatakan tujuan pemberdayaan sebagai berikut : “Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu”. (Sulistiyani, 2004:80) Pendapat tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kemampuan yang memungkinkan masyarakat menjadi mandiri, baik dalam berpikir maupun bertindak. Memandirikan masyarakat berarti membuat mereka lebih berdaya dibandingkan sebelumnya melalui proses pembelajaran yang bertahap.

2.1.3 Pendekatan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat, dalam proses pelaksanaannya dan pencapaian tujuannya, dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan 5P (Suharto, 1997:218-219), yaitu:

- a) **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, dengan memberdayakan masyarakat untuk mengatasi hambatan kultural dan struktural.
- b) **Penguatan:** meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka, serta membangun kemampuan dan kepercayaan diri yang mendukung kemandirian.
- c) **Perlindungan:** melindungi kelompok lemah dalam masyarakat dari penindasan oleh kelompok kuat dan mencegah persaingan yang

tidak seimbang, dengan menghapus diskriminasi dan dominasi yang merugikan.

- d) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka, sehingga tidak jatuh ke dalam kondisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) Pemeliharaan: menjaga kondisi yang kondusif untuk memastikan distribusi kekuasaan yang seimbang antar kelompok dalam masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk berusaha (Nur Hayati et al., 2016)

2.2 Konsep dan Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.2.1 Pengertian UMKM

Pengertian UMKM, yang awalnya diatur melalui UU No.9 Tahun 1999, kemudian disesuaikan dengan perkembangan yang semakin dinamis dan diubah menjadi Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Bisri et al., 2024) . Dengan demikian, pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2.2.2 Ciri-ciri UMKM

Adapun terdapat ciri-ciri dari UMKM menurut (Hsb et al., 2023), diantaranya yaitu:

- a) Jenis komoditi yang diusahakan tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- b) Tempat operasional sewaktu-waktu dapat berpindah.
- c) Belum melakukan kegiatan administrasi dalam menjalankan usahanya bahkan sering kalitidak dapat membedakan antara kebutuhan keuangan pribadi dan kebutuhan keuangan usaha.
- d) Sumber daya manusia (SDM) kurang memiliki jiwa kewirausahaan.
- e) Biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah.

- f) Para pelaku UMKM biasanya belum memiliki jaringan perbankan, namun ada juga yang sudah memiliki jaringan-jaringan dengan lembaga keuangan non bank.

2.2.3 Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pada Bab II pasal 5 UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain:

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Menurut (Hulu dan Wahyuni, 2021), Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah termasuk dalam mensejahterakan rakyat. Peran UMKM sangat krusial bagi suatu daerah, terutama sebagai salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi lokal (Rahayu dan Soleh, 2017). Aktivitas UMKM adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk kreatif dari suatu daerah dan membuka peluang bisnis bagi para pelaku usaha setempat (Lianna et al., 2020).

Dalam memberdayakan UMKM, terdapat kelebihan dan

kekurangan UMKM. UMKM mempunyai beberapa kekuatan potensial yang mampu menjadi pusat pengembangan usaha di masa mendatang yaitu:

- a) Penyedia lapangan kerja di sektor usaha industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b) Keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti mampu menciptakan wirausaha baru yang dapat membangkitkan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru.
- c) Mempunyai bagian sendiri usaha pasar yang unik, menggunakan manajemen yang sederhana dan fleksibel dari kemungkinan perubahan pasar.
- d) Mampu diberdayakannya sumber daya alam yang ada di sekitar, industri kecil sebagian besar dapat memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e) Memiliki potensi untuk berkembang

Selain memiliki kelebihan, menurut (Mega Lestari dan Suhadak, 2019) UMKM juga memiliki kekurangan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari UMKM terdiri dari 2 faktor:

- a) Faktor internal, yakni masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya area pemasaran produk yang sebagian besar dari pengusaha industri kecil lebih mengutamakan pada aspek produksi sedangkan untuk fungsi-fungsi pemasaran kurang mempunyai kemampuan dalam mengaksesnya, khususnya dalam memperoleh informasi pasar dan jaringan pasar, sebagai konsekuensinya sebagian besar dari mereka hanya sebagai tukang saja, konsumen cenderung belum mempercayai kualitas produk industri kecil, dan kendala yang sering dihadapi adalah masalah permodalan usaha dari sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri yang jumlahnya relatif kecil.

- b) Faktor eksternal, yakni adanya masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM antara lain adalah usulan pemecahan masalah yang tidak tepat sasaran, kurangnya monitoring yang rutin, dan adanya program-program yang saling tumpang tindih.

2.3 Infrastruktur sebagai Aksesibilitas dan Pertumbuhan Wisata

2.3.1 Pengertian Infrastruktur

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infrastruktur di artikan segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya sarana dan prasarana umum. Sarana umum dapat berupa fasilitas publik seperti jembatan, sanitasi, jalan, telepon, air bersih, sekolah, listrik, rumah sakit dan lain sebagainya. Menurut Moteff infrastruktur didefinisikan tidak hanya terbatas disudut pandang ekonomi saja melainkan dapat juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah.

Infrastruktur adalah kebutuhan dasar fisik seperti jalan, jembatan, jalur kereta api, listrik, irigasi, telekomunikasi, dan bandara, yang diperlukan untuk menciptakan sistem terstruktur agar ekonomi dapat berjalan dengan baik. Menurut Susanto, infrastruktur fisik yang memadai akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, produksi, dan distribusi barang serta jasa (Evi Sirait et al., 2024).

Infrastruktur adalah komponen penting dalam ekonomi yang berfungsi secara teratur untuk memfasilitasi aliran barang dan jasa antara pembeli dan penjual (Macmillan Dictionary of Modern Economics, 1996). Sedangkan menurut The Routledge Dictionary of Economics (1995), infrastruktur mencakup layanan utama yang disediakan oleh negara untuk mendukung kegiatan ekonomi dan masyarakat, termasuk penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.

2.3.2 Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah komponen penting dalam proses pembangunan ekonomi, karena merupakan bagian dari karakteristik pembangunan ekonomi yang selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta membantu mengurangi pengangguran, mengatasi kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Riandy et al., 2021). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendukung utama untuk pertumbuhan sebuah usaha (Hutauruk, 2021). Infrastruktur sangat krusial di setiap daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Ma'ruf dan Daud, 2013). (Hariani dan Silvia, 2014) menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan mengembangkan usaha, masyarakat memerlukan layanan dan fasilitas yang dapat mendukung berbagai aktivitas mereka. Tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki layanan distribusi barang serta jasa (Wibowo, 2016). Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan (Sihombing, 2019).

Menurut teori, pembangunan melibatkan pemanfaatan hasil dari pembangunan fisik, seperti pembangunan atau perbaikan prasarana jalan, yang bertujuan untuk menciptakan dan memperbaiki kehidupan masyarakat (Rusdi et al., 2020). Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat memanfaatkan jalan tersebut untuk berbagai keperluan, seperti mempermudah pemasaran hasil pertanian dan mempercepat arus mobilitas barang serta jasa (Burhanuddin et al., 2020).

Infrastruktur yang dirancang dengan baik dapat menciptakan daya tarik yang lebih besar bagi wisatawan, yang pada gilirannya

meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan UMKM. Sebagai contoh, pembangunan jalan yang baik di daerah pedesaan yang menjadi destinasi wisata dapat memudahkan akses wisatawan dan membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang mendukung seperti pasar lokal, pusat kerajinan, dan fasilitas rekreasi akan memperkaya pengalaman wisatawan dan mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan uang di lokasi tersebut.

Menurut studi oleh Yulianto dan Wijaya (2022) dalam *Journal of Infrastructure and Sustainable Tourism Development*, investasi infrastruktur di sektor pariwisata berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan daya saing destinasi wisata. Studi tersebut menekankan bahwa infrastruktur yang modern dan efisien tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga memperkuat hubungan antara destinasi wisata dan pasar global, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan arus wisatawan.

Selain itu, infrastruktur yang berkualitas juga memberikan dampak langsung terhadap kemampuan UMKM untuk berkembang. Jalan yang baik, akses ke listrik dan air bersih, serta fasilitas komunikasi yang memadai sangat penting bagi UMKM untuk menjalankan operasi mereka secara efisien. Ini menjadi lebih penting di daerah-daerah terpencil yang sering kali tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung, UMKM dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperluas jangkauan pasar mereka.

2.4 Prinsip-Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) adalah

program pariwisata yang berkembang secara berkelanjutan dan berjangka panjang. Pendekatan ini menggunakan prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sambil menjaga lingkungan alami, dengan perhatian dari industri, pemerintah, dan akademisi (Sri Widari, 2020). Sustainable Tourism tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam dan budaya, tetapi juga melestarikannya agar bermanfaat secara luas bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Konsep ini mencakup semua jenis usaha pariwisata, baik di kota maupun di desa, besar maupun kecil, publik maupun swasta, menandakan pentingnya pembangunan pariwisata berkelanjutan bagi semua pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata telah menjadi kebutuhan utama bagi banyak orang, dengan perputaran uang yang tinggi di destinasi wisata dan kontribusinya sebagai proyek utama untuk devisa negara, menunjukkan bahwa pariwisata kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Objek wisata yang ada di Desa Pawan dan Sialang Jaya ini bisa menjadi pariwisata andalan Kabupaten Rokan Hulu. Tentunya harus dikelola dengan baik dalam jangka waktu yang Panjang. Dengan melewati proses tersebut maka akan mengalami perkembangan. Di sisi lain peran masyarakat dan pemerintah daerah terkait harus turun serta disamping pengelola.

2.5 Kebaharuan Strategi: Sinergi CBT dan *Circular Economy*

Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Infrastruktur sebagai bentuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan sangat penting dilakukan. Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya sebagai pilot project yang berpotensi sebagai pengembangan desa wisata berbasis *Community-Based Tourism Model*. Hasil kajian ini memberikan kebaruan pada pendekatan ekonomi sirkular dalam CBT untuk

mewujudkan *Sustainable Tourism*. Hasil kajian ini memberikan penguatan dan improvisasi pada strategi terdahulu dengan penggabungan pengembangan UMKM, *Sustainable Tourism* dengan *Community Based Tourism* yang belum dieksplorasi pada kajian-kajian terdahulu. Berikut digambarkan state of art dan konsep baru dalam pengembangan desa wisata berbasis *Community-Based Tourism Model*.



Gambar 2.1 Konsep Kebaharuan Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Infrastruktur Pendekatan *Community-Based Tourism Model*

BAB III

Pendekatan *Community-Based Tourism* Dalam Pengembangan *Sustainable Tourism*

3.1 Pendekatan Pemecahan Masalah

Pemecahan fokus masalah dari kajian ini melibatkan pendekatan metode campuran (*mix method*) guna memperoleh informasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa hasil kajian ini mencerminkan kondisi faktual di lapangan secara utuh dan mendalam. Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi dan wawancara, yang memungkinkan pengkaji memperoleh perspektif langsung dari pelaku dan pemangku kepentingan. Selain itu, kajian ini juga menggunakan metode *Analitycal Hierarchy Proccess* (APH) sebagai alat untuk menetapkan prioritas strategi pengembangan berbasis komunitas.

Metode ini digunakan dalam pengembangan desa wisata dengan pendekatan *Community-Based Tourism Model* yang sejalan dengan masyarakat sebagai sasaran pengembangan pariwisata. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis untuk mendukung temuan bahwa integrasi pendekatan ekonomi dalam kerangka CBT memiliki potensi strategis dalam mewujudkan *Sustainable Tourism*.

3.2 Pendekatan *Community-Based Tourism*

Community Based Tourism (CBT), atau pariwisata berbasis masyarakat, adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai

aktor utama dengan memberdayakan mereka dalam kegiatan kepariwisataan. *Community-Based Tourism* (CBT) merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan destinasi. Berbeda dengan pendekatan pariwisata konvensional yang umumnya didominasi oleh pihak eksternal, CBT menekankan pentingnya penguasaan dan pengelolaan aset wisata oleh komunitas setempat, sehingga manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat tetap terdistribusi secara adil di dalam lingkungan komunitas itu sendiri.

Prinsip dasar CBT adalah memastikan bahwa manfaat pariwisata maksimal dirasakan oleh kesejahteraan masyarakat. Konsep ini diterapkan oleh para perancang dan pelaku pembangunan pariwisata sebagai strategi untuk melibatkan komunitas secara aktif dalam pembangunan pariwisata. Tujuannya adalah untuk memberdayakan secara sosial dan ekonomi komunitas serta memberikan nilai tambah dalam pariwisata, terutama bagi para wisatawan (Irwan Sukmawan et al., 2021).

Menurut Hausler, *Community Based Tourism* adalah pendekatan pembangunan pariwisata yang fokus pada masyarakat lokal, baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun yang tidak. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk manajemen dan pengembangan pariwisata, yang pada akhirnya mendorong pemberdayaan politik melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk pembagian keuntungan pariwisata yang lebih adil untuk masyarakat lokal. Menurut Suansri (2003:14), CBT adalah jenis pariwisata yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. CBT berfungsi sebagai alat untuk pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan, atau dengan kata lain, sebagai

sarana untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Menurut Isnaini Muallisin (2007), konsep Community Based Tourism (CBT) memiliki beberapa prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan komunitas lokal, yaitu:

- a) Mengakui, mendukung, dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat.
- b) Melibatkan anggota masyarakat sejak awal dalam semua aspek.
- c) Mendorong kebanggaan masyarakat terhadap pariwisata.
- d) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- e) Menjamin kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- f) Mempertahankan karakter dan budaya lokal yang unik.
- g) Meningkatkan pemahaman lintas budaya.
- h) Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia.
- i) Membagi keuntungan secara adil di antara anggota masyarakat.
- j) Menyumbangkan persentase pendapatan tetap untuk proyek komunitas.

Prinsip-prinsip dasar CBT mencakup partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan berkelanjutan atas sumber daya lokal, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya setempat. Dalam konteks kekinian, CBT dipandang semakin relevan karena menawarkan model pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pelibatan komunitas sejak awal, model ini memastikan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana penguatan kohesi sosial, penjaga identitas budaya, dan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Suryani dan Kurniawan (2022) yang dipublikasikan dalam *Journal of Community Tourism Development*, pendekatan CBT memungkinkan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap investor luar.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi CBT mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian budaya. Selain itu, CBT juga membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan

3.3 Kerangka Kajian Lapangan dan Strategi Pengumpulan Informasi

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kajian awal terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna menelaah dampak pembangunan infrastruktur jalan tol terhadap lingkungan dan keberlanjutan pariwisata (*sustainable tourism*) di sepanjang koridor tol. Menurut (Murshed, 2022), Pembangunan jalan tol akan mempengaruhi proses masyarakat baik dari segi penghidupan, pendapatan, dan status sosial. Tidak terkecuali UMKM yang berdiri di sekitar pembangunan jalan tol turut mengalami dampak tersebut.

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, tidak dapat dilepaskan bahwa pembangunan jalan tol akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dampak terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan bahkan ancaman kebangkrutan bagi para pemilik usaha (Ersa, 2022). Namun dengan pembangunan akan memperlancar proses UMKM sebagai pembuka lapangan pekerjaan. Pengembangan infrastruktur tentunya juga mempertimbangkan berbagai indikator kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan tingkat partisipasi tenaga kerja (Rahayu et al., 2022). Infrastruktur merupakan alat urat nadi perekonomian masyarakat sebagai prasarana transportasi (Rahayu et al., 2018). Bagaimana proses pengembangan UMKM yang dilakukan oleh suatu

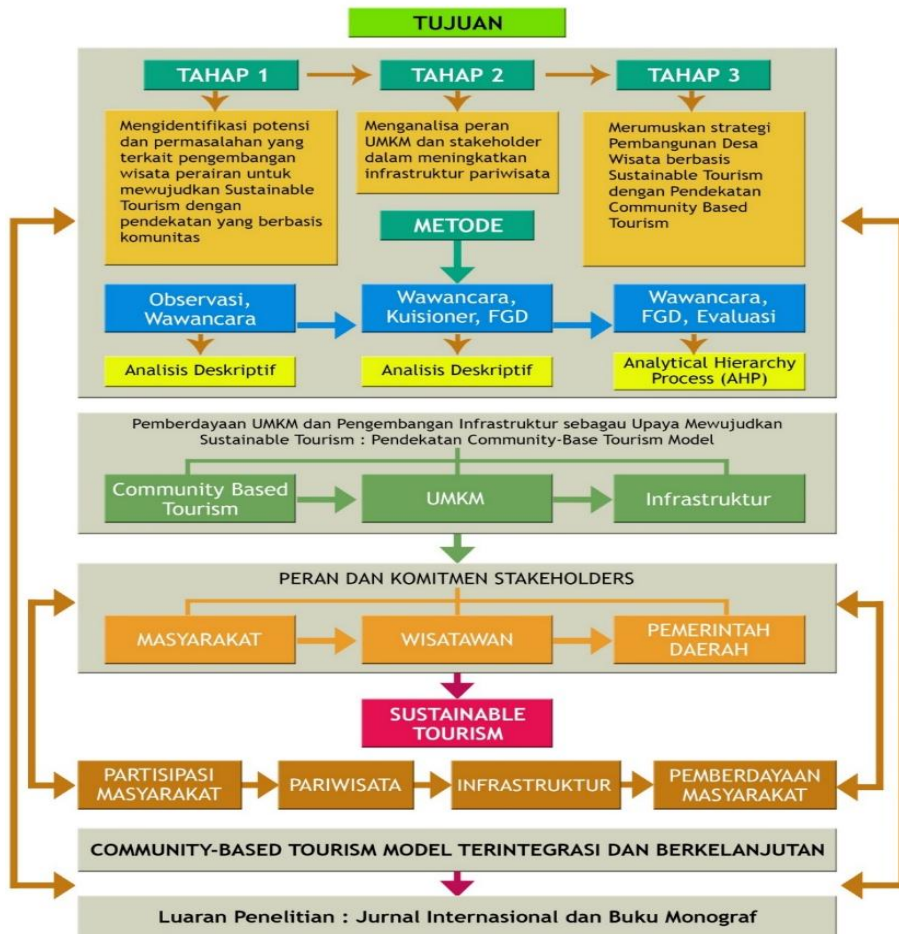
masyarakat yang tinggal disekitar dengan adanya pembangunan infrastruktur (Rahayu et al., 2023). Kajian ini menggunakan metode analisis data panel sederhana dan *Environment Impact Analysis* (EIA).

Pengembangan lanjutan pada tahun 2024 sebagai menggunakan beberapa metode, diantaranya observasi, wawancara, kuesioner dan FGD (Creswell JW et al., 2016). Di pedesaan pada umumnya masalah infrastruktur dan keisolasian terutama jalan darat dan minim (Rahayu et al., 2017). Fasilitas yang ada di Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya terutama pada objek wisata perairan akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam pengidentifikasian profil dan pemetaan UMKM penelitian ini akan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk melakukan penandaan lokasi dan untuk melihat secara arial lokasi wisata, yang nantinya akan menghasilkan suatu peta wilayah (Lion H et al., 2013). Teknologi digital memungkinkan aliran, keterbukaan dan aksesibilitas informasi dan komunikasi yang benar-benar meruntuhkan hambatan terhadap pendidikan, membentuk pemikiran mandiri dan mendorong praktik wirausaha (Wibowo dan Belia, 2016). Pada dasarnya masyarakat harus mengerti cara mengembangkan wilayahnya yang mempunyai potensi pariwisata, nantinya *Community-Based Tourism* akan berpengaruh pada proses pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata, pemberdayaan UMKM, dan *Sustainable Tourism* (Wulandari, 2023). (Rahayu et al., 2023) menjelaskan bahwa minimnya akses infrastruktur menghambat perekonomian. Proses kajian dilakukan melalui tiga tahap:

1. **Tahap pertama**, observasi awal dan wawancara eksploratif guna mengidentifikasi isu-isu utama terkait objek kajian.
2. **Tahap kedua**, pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM dan pemangku kepentingan lokal.

3. **Tahap ketiga**, pelaksanaan FGD dan evaluasi bersama, dengan melibatkan perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi untuk merumuskan strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara kolaboratif.

Adapun kerangka kajian lapangan dan strategi engumpulan informasi yang telah dilakukan pada tahun 2024, yaitu:



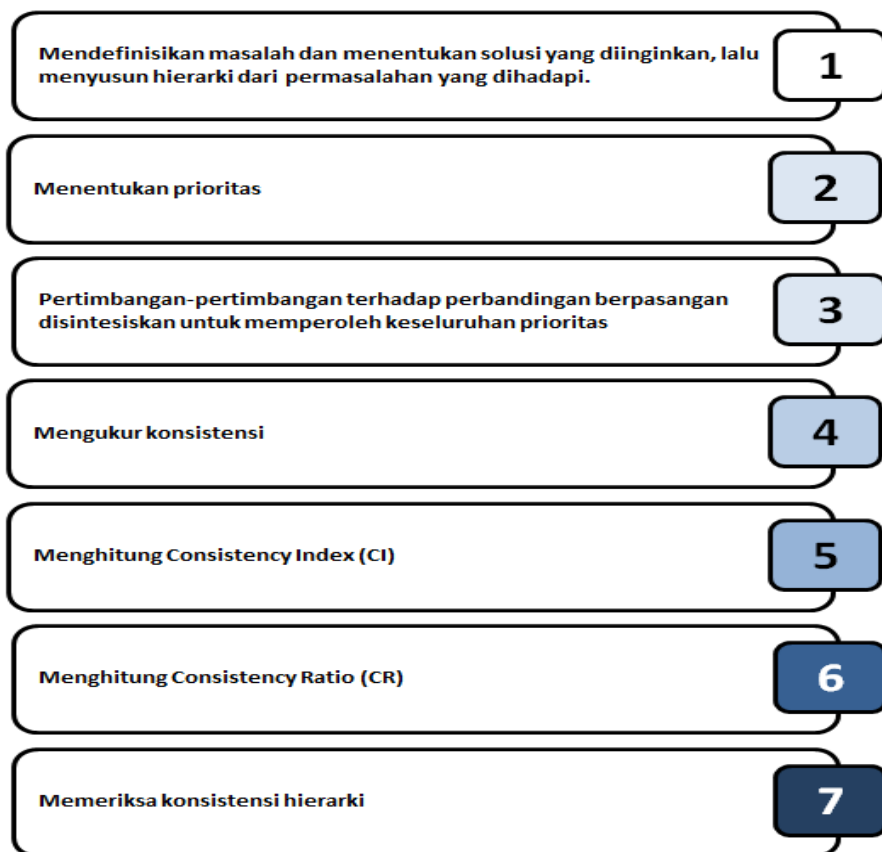
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

3.4 Alur Analisa dan Pengambilan Keputusan

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan *mixed methods*. Hasil data yang diterima dapat diungkapkan dalam bentuk tertulis atau direkam dalam bentuk

audio visual baik berupa audio, gambar maupun video digunakan untuk proses pelaksanaan (Miles dan Huberman, 2014). Kemudian data yang didapatkan akan di evaluasi dengan metode triangulasi agar data yang ada terkategoriikan valid (Rijali A, 2019). Dengan memperhatikan pemetaan wilayah desa wisata dan infrastruktur pariwisata secara berkelanjutan, profiling UMKM dengan mengidentifikasi sektor, dan bidang usaha (Sulistyono, 2021). Kemudian Analisis pengembangan desa wisata, pengembangan infrastruktur pariwisata, dan pengembangan UMKM, dan hasil setelah berkembang dengan analisis risiko secara deskriptif sesuai dengan kondisi di lapangan (Rismawati dan Sitepu, 2021). Metode analisis adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki (Falatehan, 2016). Menurut (Prajanti, 2016) Teknik AHP digunakan untuk menentukan strategi terkait suatu kebijakan. Metode *Analitical Hierarchy Proccess* (AHP) akan dihasilkan strategi pengembangan infrastruktur sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Tourism*. Dalam menentukan strategi prioritas maka diperlukan langkah- langkah dalam metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Langkah-Langkah AHP

Gambar 3.2 menggambarkan tahapan sistematis dalam penerapan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* yang digunakan untuk menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi kebijakan. Langkah-langkah dalam Proses AHP:

1. Mendefinisikan Masalah dan Menyusun Hierarki

Langkah awal adalah merumuskan permasalahan utama dan solusi yang diinginkan secara jelas. Selanjutnya, masalah diuraikan menjadi bentuk hierarki, yang terdiri atas tujuan utama, kriteria,

subkriteria (jika ada), dan alternatif solusi.

2. Menentukan Prioritas

Setelah hierarki terbentuk, setiap elemen pada tingkat yang sama dibandingkan secara berpasangan (pairwise comparison) untuk menilai tingkat kepentingannya relatif terhadap kriteria di tingkat atas.

3. Sintesis Prioritas

Nilai perbandingan berpasangan kemudian disintesis untuk memperoleh bobot keseluruhan dari setiap alternatif atau kriteria. Proses ini menghasilkan urutan prioritas berdasarkan kepentingan relatif yang telah ditentukan.

4. Mengukur Konsistensi

AHP menyediakan mekanisme untuk mengukur konsistensi logika dalam penilaian perbandingan berpasangan. Ini penting untuk memastikan bahwa preferensi yang diberikan tidak bertentangan.

5. Menghitung Consistency Index (CI)

Indeks Konsistensi dihitung sebagai indikator kuantitatif dari konsistensi matriks perbandingan. CI dihitung dari nilai eigen maksimum ($\lambda_{\max}$) yang diperoleh dari matriks perbandingan.

6. Menghitung Consistency Ratio (CR)

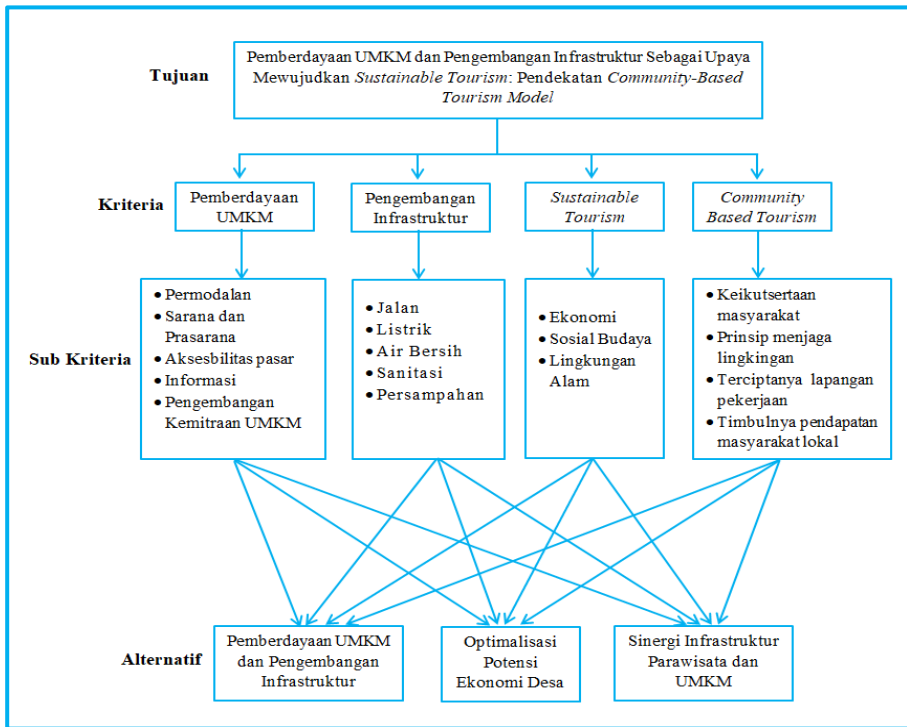
Consistency Ratio merupakan rasio antara Consistency Index (CI) dan Random Consistency Index (RI). Nilai CR digunakan untuk menilai tingkat konsistensi penilaian. Jika $CR \leq 0,1$ (atau 10%), maka tingkat konsistensi dapat diterima.

7. Memeriksa Konsistensi Hierarki

Langkah terakhir adalah memeriksa keseluruhan struktur hierarki untuk memastikan bahwa hasil akhir benar-benar mencerminkan preferensi yang logis dan konsisten dari pengambil keputusan.

Selanjutnya berikut digambarkan hierarkis pelaksanaan kajian

ini, secara rinci sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Struktur Hierarki Penelitian

Gambar 3.3 menyajikan kerangka berpikir strategis dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas melalui sinergi antara pemberdayaan UMKM dan pembangunan infrastruktur. Bagan ini menggambarkan hubungan antara tujuan utama, yaitu mewujudkan *sustainable tourism* dengan pendekatan *Community-Based Tourism (CBT)*, melalui empat kriteria utama: pemberdayaan UMKM, pengembangan infrastruktur, keberlanjutan pariwisata, dan partisipasi komunitas. Masing-masing kriteria dijabarkan ke dalam sub-kriteria yang relevan, dan selanjutnya dihubungkan dengan alternatif strategi pengembangan, yaitu: pemberdayaan UMKM dan pengembangan infrastruktur, optimalisasi potensi ekonomi desa, serta sinergi infrastruktur pariwisata dan UMKM. Struktur ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis untuk mendorong

pembangunan pariwisata yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Selanjutnya dilakukan sektor yang berkontribusi pada wilayah tersebut akan dianalisis guna menentukan sejauh mana optimalisasi pariwisata di lokasi wisata alam (Sutrisno, 2021). Dalam penerapan *Community-Based Tourism* untuk mewujudkan *Sustainable Tourism* membutuhkan peran masyarakat lokal. UMKM ini akan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat mengelola dan menjalankan proses tersebut disamping bantuan pengelolaan dari pemerintah daerah. Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerataan ekonomi adalah melalui pembangunan fasilitas infrastruktur dan pengembangan promosi pariwisata. Hal ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan menjadi faktor berjalannya pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan (Sidahuruk dan Sulistiyono, 2022).

Hasil evaluasi nantinya untuk melihat proses UMKM yang berjalan dengan baik didapatkan hasil maka akan dijalankan seterusnya (Kiwang dan Arif, 2020). Partisipasi masyarakat seringkali disarankan sebagai unsur penting dalam meningkatkan kualitas kontribusi pariwisata terhadap pembangunan nasional (Giampiccoli et al., 2018). Dampak penerapan konsep *Community-Based Tourism* dapat dilihat melalui aspek ekonomi (diversifikasi lapangan kerja, perbaikan kondisi perumahan dan pengembangan usaha baru), sosial (interaksi sosial, partisipasi masyarakat, perubahan pola pikir), adopsi budaya, dan lingkungan (perbaikan fasilitas umum) (Ahsani R et al., 2018). Keluaran pada penelitian ini adalah Luaran dari penelitian ini adalah jurnal internasional yakni *International Journal of Sustainable Development and Planning* (ISSN: 1743-761X) dan Buku monograf sebagai

referensi untuk daerah lain yang akan mewujudkan *Sustainable Tourism* berbasis *Community Based Tourism* yang didukung penuh oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

BAB IV

Analisis Lapangan dan Temuan Strategis

Kajian ini dilakukan di Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya. Dalam pengumpulan informasi menggunakan kuesioner yang disebarakan pada beberapa kelompok responden yang meliputi pengunjung wisata, pengelola wisata, masyarakat sekitar, dan pemerintah terkait/pemangku kepentingan setempat. Kuesioner yang diberikan kepada pengunjung wisata mencakup pertanyaan mengenai demografi, frekuensi kunjungan, persepsi terhadap wisata perairan, dan kepuasan terhadap fasilitas yang tersedia. Kuesioner untuk pengelola wisata berfokus pada manajemen operasional, tantangan yang dihadapi, dan pandangan mereka mengenai pengembangan wisata perairan.

Kuesioner untuk kelompok masyarakat sekitar mencakup pertanyaan tentang persepsi mereka terhadap dampak pariwisata, keterlibatan dalam kegiatan pariwisata, dan harapan untuk pengembangan wisata di masa depan. Terakhir, kuesioner yang diberikan kepada pemerintah terkait bertujuan untuk memahami kebijakan, dukungan pemerintah, dan strategi pengembangan wisata air di Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya. Selain kuesioner, peneliti juga menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)* untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dan holistik dari para pemangku kepentingan. Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan *Analytic Hierarchy Process (AHP)* untuk menentukan prioritas pengembangan wisata yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat lokal.

4.1 Potensi dan Sumber Daya Pariwisata Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya

Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya memiliki potensi pariwisata yang khas yang berakar pada lanskap alam. Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya, yang dicirikan oleh sumber daya air, menarik pengunjung yang tertarik pada wisata perairan. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, di desa ini terdapat wisata perairan seperti Air Panas Hapanasan, Air Panas Suaman, Batu Gajah, Air Terjun Sipogas dan Danau Sipogas. Akan tetapi, para pemangku kepentingan lokal, termasuk anggota komunitas dan pengelola pariwisata, mengakui adanya potensi pariwisata yang belum tergarap maksimal di wilayah ini. Antusiasme lokal ini sangat penting untuk pengembangan pariwisata yang sukses, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian yang menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata (Hanafiah et al., 2013).

Lebih lanjut, pengembangan sumber daya pariwisata di desa-desa ini tidaklah tanpa tantangan. Infrastruktur yang tidak memadai, upaya pemasaran yang terbatas, dan investasi yang kurang merupakan hambatan signifikan. Masalah-masalah ini umum terjadi dalam konteks pariwisata pedesaan dan dapat menghambat pertumbuhan pariwisata meskipun terdapat sumber daya yang menarik (Telfer dan Sharpley, 2015). Keterlibatan komunitas sangat penting untuk pariwisata berkelanjutan. Studi lain menunjukkan bahwa memberdayakan komunitas lokal melalui pelatihan dan perencanaan partisipatif dapat meningkatkan pengembangan pariwisata dan memastikan manfaat ekonomi didistribusikan secara merata di antara penduduk (Snyman, 2016)

Sumber daya alam di desa Pawan dan Sialang Jaya, seperti wisata alam yang memiliki air yang panas dan dingin, menyediakan

dasar yang kuat untuk pengembangan pariwisata perairan berbasis komunitas. Hasil analisis, berdasarkan informasi dari informan dan dilihat dari potensi pariwisata di desa-desa ini, menunjukkan kekuatan seperti sumber daya alam yang melimpah. Namun, terdapat kelemahan seperti infrastruktur yang buruk, peluang untuk mengembangkan pasar pariwisata perairan, dan ancaman termasuk degradasi lingkungan.

Rekomendasi strategis untuk meningkatkan potensi pariwisata meliputi pengembangan infrastruktur, mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan, dan meningkatkan upaya pemasaran. Kesimpulannya, Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya memiliki potensi pariwisata yang signifikan yang dapat dimanfaatkan melalui strategi pengembangan yang ditargetkan. Mengatasi tantangan dan memanfaatkan kekuatan dapat memungkinkan desa-desa ini muncul sebagai tujuan wisata yang menonjol, berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi lokal.

4.2 Infrastruktur dan Community Based Tourism

Infrastruktur adalah komponen penting dari pengembangan pariwisata, berfungsi sebagai tulang punggung yang mendukung kegiatan wisata. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di desa Pawan dan Sialang Jaya, kondisi infrastruktur saat ini, termasuk jalan, akomodasi, dan fasilitas dasar, secara signifikan mempengaruhi kualitas pengalaman wisatawan. Hal ini tercermin dari keluhan masyarakat dan pengunjung yang merasa bahwa infrastruktur yang ada belum memadai, dengan kondisi jalan yang buruk, kurangnya akomodasi yang layak, dan fasilitas umum yang tidak lengkap. Keterbatasan ini menghambat kemampuan desa untuk menarik dan mempertahankan wisatawan, mempengaruhi pertumbuhan pariwisata secara keseluruhan (Kar et al., 2023).

Community-Based Tourism (CBT) adalah pendekatan berkelanjutan yang menekankan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata, memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata didistribusikan di antara anggota masyarakat. Inisiatif *CBT* yang ada di desa-desa ini meliputi tur yang dipimpin masyarakat, homestay lokal, dan program deskranasda. Inisiatif ini tidak hanya menyediakan pengalaman unik bagi wisatawan tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan peluang kerja dan mempromosikan warisan budaya. Namun, pelaksanaan *CBT* menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pelatihan, sumber daya keuangan yang terbatas, dan resistensi terhadap perubahan di antara beberapa anggota masyarakat. Mengatasi tantangan ini melalui program pelatihan yang komprehensif, dukungan keuangan, dan inisiatif keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan *CBT* (L. A. de Abreu et al., 2024; Haywood)

Meningkatkan infrastruktur membutuhkan pendekatan multi-aspek, termasuk investasi pemerintah, kemitraan publik-swasta, dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan. Memprioritaskan pengembangan jalan, memperbaiki fasilitas umum, dan mempromosikan akomodasi ramah lingkungan dapat secara signifikan meningkatkan infrastruktur pariwisata. Infrastruktur yang lebih baik secara langsung menguntungkan *CBT* dengan meningkatkan aksesibilitas, keselamatan, dan kenyamanan bagi wisatawan. Hal ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan peningkatan kedatangan wisatawan, tinggal lebih lama, dan pengeluaran wisatawan yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada keberlanjutan pariwisata di desa-desa tersebut.

Kesimpulannya, mengatasi tantangan infrastruktur dan mempromosikan *CBT* sangat penting untuk pengembangan pariwisata

berkelanjutan di Pawan dan Sialang Jaya. Dengan memanfaatkan kekuatan masyarakat dan meningkatkan infrastruktur, desa-desa ini dapat menciptakan sektor pariwisata yang kuat yang menguntungkan semua pemangku kepentingan.

4.3 *Community Based Tourism* dalam Pemberdayaan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi sektor pariwisata, menyediakan barang dan jasa yang meningkatkan pengalaman wisatawan. Di Pawan dan Sialang Jaya, UMKM termasuk kerajinan lokal, pedagang makanan, dan akomodasi kecil, semuanya berkontribusi pada ekonomi pariwisata. Status UMKM di desa-desa ini masih menunjukkan arah bisnis yang tradisional dalam melayani wisatawan, seperti penjualan makanan ringan dan penyewaan alat renang. Sementara beberapa UMKM berhasil masuk ke pasar pariwisata, yang lain berjuang karena kurangnya akses pasar, keterbatasan keuangan, dan keterampilan bisnis yang terbatas. Tantangan ini serupa dengan yang diidentifikasi oleh Manzoor, yang mencatat bahwa UMKM pedesaan sering menghadapi hambatan pertumbuhan yang signifikan, terkhusus karena keterbatasan keuangan (Manzoor et al., 2021).

Community-Based Tourism (CBT) menyediakan platform bagi UMKM untuk berkembang dengan menciptakan hubungan langsung antara wisatawan dan bisnis lokal (Han et al., 2019). Hubungan ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata tetap berada di dalam komunitas, mempromosikan kewirausahaan lokal dan mengurangi kebocoran ekonomi. Namun, UMKM menghadapi tantangan seperti akses terbatas ke modal, pelatihan bisnis yang tidak memadai, serta pengunjung yang tidak menentu dan bahkan menurun. Mengatasi tantangan ini membutuhkan intervensi yang ditargetkan,

skema mikrofinansial, program pengembangan bisnis, dan juga dukungan pemasaran.

Memberdayakan UMKM melalui *CBT* melibatkan integrasi bisnis lokal ke dalam rantai nilai pariwisata. Ini dapat dicapai melalui inisiatif seperti promosi produk lokal, kemitraan bisnis, dan program peningkatan kapasitas yang meningkatkan keterampilan bisnis dan akses pasar. Peran pemerintah dan LSM sangat penting dalam mendukung UMKM dengan memberikan bantuan keuangan, pelatihan bisnis, dan pengembangan infrastruktur. Keterlibatan mereka memastikan bahwa UMKM menerima dukungan yang diperlukan untuk tumbuh dan bersaing di pasar pariwisata, terkhusus pada pariwisata perairan.

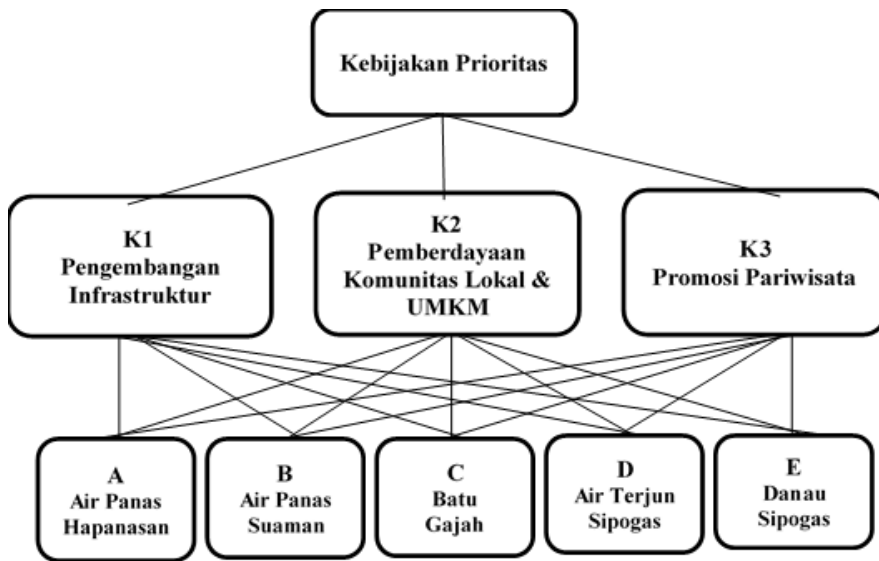
Kesimpulannya, pemberdayaan UMKM dalam *CBT* dapat membawa dampak baik terhadap pariwisata dan kemajuan bisnis lokal yang ada. Hal ini menunjukkan potensi UMKM untuk berkembang dengan dukungan inisiatif *CBT*. Oleh karena itu, *CBT* adalah pendekatan yang kuat untuk memberdayakan UMKM di Pawan dan Sialang Jaya. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengatasi tantangan, desa-desa ini dapat mengembangkan sektor pariwisata yang dinamis yang menguntungkan bisnis lokal dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

4.4 Kebijakan Prioritas dalam Pengembangan Pariwisata Perairan

Pada bagian ini, peneliti mencoba mendalami tentang kebijakan apa yang harus diprioritaskan dalam pemberdayaan UMKM dan pengembangan infrastruktur sebagai upaya mewujudkan *sustainable tourism*. Alternatif kebijakan yang menjadi pilihan didapatkan dari hasil analisis pada bagian sebelumnya, yaitu kebijakan pengembangan infrastruktur, pemberdayaan komunitas lokal dan UMKM, dan promosi

pariwisata. Ketiga kebijakan ini dirasa penting untuk diterapkan pada wisata perairan di desa Pawan dan Sialang Jaya. Untuk mengetahui alternatif kebijakan yang paling penting untuk diprioritaskan, peneliti menganalisis data dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Proses AHP dimulai dengan menentukan tujuan utama dari pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan ini diuraikan menjadi kriteria dan subkriteria yang relevan, membentuk struktur hierarki yang memudahkan analisis. Setiap elemen dalam hierarki ini kemudian dibandingkan secara berpasangan (*pairwise comparison*) untuk menentukan tingkat kepentingan relatif terhadap elemen lain. Proses ini menghasilkan matriks perbandingan berpasangan (PCM) yang digunakan untuk menghitung bobot relatif setiap kriteria dan subkriteria melalui normalisasi dan rata-rata geometrik. Konsistensi logis dari perbandingan ini diukur menggunakan Indeks Konsistensi (CI) dan Rasio Konsistensi (CR) untuk memastikan validitas hasil. Setelah bobot kriteria ditentukan, langkah berikutnya adalah mengulangi proses perbandingan berpasangan untuk alternatif keputusan dalam konteks setiap kriteria. Bobot relatif dari setiap alternatif dihitung dan digabungkan untuk menentukan prioritas global. Hasil akhir dari analisis AHP memberikan peringkat alternatif keputusan berdasarkan prioritas keseluruhan, memungkinkan pengambil keputusan untuk memilih opsi terbaik berdasarkan tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini membantu menyederhanakan keputusan yang kompleks dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan memastikan konsistensi dalam evaluasi elemen yang berbeda (Saaty, 2008).



Gambar 4. 1 Bagan Hirarki Persoalan

AHP dilakukan berdasarkan jawaban dari 100 responden. Responden yang dipilih adalah masyarakat sekitar yang peneliti asumsikan memiliki pengetahuan yang relevan tentang kebutuhan dari setiap tempat wisata perairan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penghitungan, tiga kriteria utama diberi kode K1 sampai dengan K3 dan A sampai E untuk alternatif tempat wisata.

Tabel 4. 1 Perhitungan PCM Sebelum Ternormalisasi

<i>Comparison Matrix</i>			
<i>Kebijakan</i>	A	B	C
A	1	1,86	2,68
B	0,54	1	2,78
C	0,37	0,36	1
S,O,R	1,91	3,22	6,45

Sumber: Olah Data, 2024

Tabel 4. 2 Perhitungan PCM Sesudah Ternormalisasi dan Perhitungan Bobot Prioritas

Matrix				Priority	Parameter	Value	Result
A	B	C					
A	0,5 2	0,5 8	0,4 1	0,51	Max, Eigen Value	3,06	Consistency Ratio is 4,96%, Inconsistency is acceptable
B	0,2 8	0,3 1	0,4 3	0,34	CI (Consistensi Index)	0,02 9	
C	0,2 0	0,1 1	0,1 5	0,15	RI (Rasio Index)	0,58	
S,O, R	1,0 0	1,0 0	1,0 0	1,00	CR = CI/RI	4,96 %	

Sumber: Olah data, 2024

Pada tahap awal, perhitungan PCM dilakukan tanpa normalisasi (lihat table 4.1), dan kemudian PCM dinormalisasi. Selanjutnya, untuk menentukan bobot kriteria dan alternatif, dilakukan perhitungan bobot prioritas untuk setiap elemen (lihat tabel 4.2). Setelah didapatkan rasio konsistensi yang di bawah dari 10%, maka selanjutnya dilakukan *squaring matriks* dari PCM sebelum ternormalisasi. *Squaring matriks* dilakukan sampai nilai *Eigen Vector* pertama dikurangi *Eigen Vector* kedua mendekati nol. Dalam hal ini, *squaring matrix* dilakukan sebanyak dua kali (lihat pada tabel 4.3).

Tabel 4. 3 *Squaring the Matrix*

Squaring the Matrix: 2nd attempt					
	A	B	C	S,O,C	2nd Eigen Vector
A	28,80	43,05	95,93	167,78	50,79%
B	19,25	28,80	64,16	112,22	33,97%
C	8,64	12,91	28,80	50,35	15,24%
				330,35	1,00

Sumber: Olah Data, 2024

Tabel 4.3 menunjukkan hasil tahap kedua dari proses kuadrat matriks (*squaring the matrix*) dalam perhitungan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Proses ini dilakukan untuk memperoleh nilai *eigen*

vector sebagai bobot prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan. Terdapat tiga alternatif utama yang dianalisis, yaitu A (Pengembangan Infrastruktur), B (Pemberdayaan Komunitas Lokal & UMKM), dan C (Promosi Pariwisata). Nilai total kolom ($\sum Q,C$) menunjukkan hasil penjumlahan tiap baris, yang selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai eigen vector relatif. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa alternatif A memiliki bobot tertinggi sebesar 50,79%, diikuti oleh B sebesar 33,97%, dan C sebesar 15,24%. Nilai total eigen vector adalah 1,00, yang menunjukkan bahwa proses normalisasi telah dilakukan dengan tepat. Data ini menjadi dasar penetapan prioritas dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan pariwisata berbasis komunitas. Adapun bobot prioritas kriteria ditampilkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Bobot Prioritas Kriteria

Criterion	Rank	%
Pengembangan Infrastruktur	1	50,8%
Pemberdayaan Komunitas Lokal & UMKM	2	34,0%
Promosi Pariwisata	3	15,2%

Sumber: Olah data, 2024

Adapun persentase kebijakan prioritas, diperoleh digambarkan pada began berikut



Gambar 4. 2 Diagram Prioritas Kriteria

Sumber: Olah data, 2024

Dari perhitungan yang dilakukan, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa kebijakan prioritas pertama dalam pengembangan pariwisata perairan adalah pengembangan infrastruktur dengan bobot 50,79%. Kedua, pemberdayaan komunitas lokal dan UMKM dengan bobot 33,97%. Ketiga, promosi pariwisata dengan bobot 15,24%. Setelah itu, dilakukan perhitungan yang sama berdasarkan alternatif yang ada dan kemudian dikalikan dengan hasil perhitungan kriteria. Adapun hasil perkalian akan menghasilkan prioritas global kriteria dan alternatif yang dapat diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan per kriteria (lihat tabel 4.6). Adapun bobot prioritas alternatif yang diperoleh ditampilkan pada Tabel 4.5. yaitu:

Tabel 4. 5 Bobot Prioritas Alternatif

Pengembangan Infrastruktur			Pemberdayaan Komunitas Lokal dan UMKM		Promosi Pariwisata	
Location Rank	Rank	%	Rank	%	Rank	%
A (Air Panas Hapanasan)	1	24,56%	1	24,76%	1	24,48%
B (Air Panas Suaman)	3	20,38%	2	21,00%	4	18,34%
C (Batu Gajah)	2	21,95%	3	20,49%	2	20,29%
D (Air Terjun Sipogas)	4	17,42%	4	17,69%	3	19,61%
E (Danau Sipogas)	5	15,68%	5	16,06%	5	17,27%

Sumber: Olah Data, 2024

Tabel 4.5 di atas menunjukkan hasil perhitungan pada setiap alternatif yang ada. Perhitungan untuk bobot alternatif dilakukan dengan cara yang sama dengan perhitungan pada bobot kriteria. Hasil di atas menunjukkan prioritas alternatif yang berbeda-beda pada setiap kriteria yang ada. Untuk mendapatkan bobot global dari kriteria dan alternatif yang ada, dilakukan dengan mengalikan bobot keduanya. Berikut digambarkan kebijakan prioritas, yaitu



Gambar 4.3 Diagram Prioritas Alternatif

Gambar 4.3 tersebut menampilkan struktur kebijakan prioritas dalam pengembangan destinasi wisata berdasarkan tiga fokus utama, yaitu: Pengembangan Infrastruktur, Pemberdayaan Komunitas Lokal & UMKM, serta Promosi Pariwisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa fokus tertinggi diberikan pada aspek Pengembangan Infrastruktur (50,79%), diikuti oleh Pemberdayaan Komunitas Lokal & UMKM (33,97%), dan Promosi Pariwisata (15,24%). Masing-masing kategori kebijakan kemudian dijabarkan ke dalam lima destinasi wisata prioritas yang dinilai berdasarkan bobot kepentingan relatif. Secara konsisten, destinasi Air Panas Hapanasan muncul sebagai prioritas tertinggi dalam ketiga kategori, diikuti oleh destinasi lainnya seperti Batu Gajah, Air Panas Suaman, Air Terjun Sipogas, dan Danau Sipogas. Temuan ini mencerminkan arah strategis kebijakan pembangunan wisata yang menekankan sinergi antara perbaikan infrastruktur dan

pemberdayaan ekonomi lokal untuk mendukung penguatan daya saing destinasi secara keseluruhan. Adapun bobot prioritas global yang diperoleh, disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Bobot Prioritas Global

Prioritas Global		
Location Rank	Rank	%
A (Air Panas Hapanasan)	1	24,62%
B (Air Panas Suaman)	3	20,28%
C (Batu Gajah)	2	21,20%
D (Air Terjun Sipogas)	4	17,85%
E (Danau Sipogas)	5	16,05%

Sumber: Olah Data, 2024

Berdasarkan gambar 4.3 dan tabel 4.6 di atas, menunjukkan hasil perhitungan global prioritas secara lengkap dengan urutan kriteria dan alternatif yang tercermin pada penulisan *ranking* 1-5. Untuk kriteria, kebijakan prioritas pertama dalam pengembangan pariwisata perairan adalah pengembangan infrastruktur dengan bobot 50,79%. Kedua, pemberdayaan komunitas lokal dan UMKM dengan bobot 33,97%. Ketiga, promosi pariwisata dengan bobot 15,24%. Selanjutnya, secara keseluruhan dari kebijakan tersebut, penerapannya dirasa penting untuk diterapkan pada alternatif lokasi tempat wisata dengan urutan sebagai berikut. Pertama, Air Panas Hapanasan dengan bobot 24,62%. Kedua, Batu Gajah dengan bobot 21,20%. Ketiga, Air Panas Suaman dengan bobot 20,28%. Keempat, Air Terjun Sipogas dengan bobot 17,85%. Kelima, Danau Sipogas dengan bobot 16,05%. Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan kebijakan pada tempat wisata perairan di desa Pawan dan Sialang Jaya.

Berdasarkan hasil pemetaan melalui *interactive mapping* dari *Geographic Information System (GIS)*, diperoleh informasi bahwa kelima lokasi wisata berada di antara perkebunan kelapa sawit dengan jarak yang lumayan jauh dari permukiman warga. Air terjun Sipogas

merupakan lokasi wisata yang letaknya paling jauh dan terletak di antara perbukitan sehingga medan yang dilalui cukup sulit dan curam. Sedangkan wisata Air Panas Hapanasan, Batu Gajah, Danau Sipogas dan Air Panas Suaman berada di medan yang datar-landai. Selain itu, akses jalan menuju lokasi wisata tersebut cukup terbatas terutama akses menuju wisata Air Terjun Sipogas.

Walaupun letaknya lumayan jauh dan akses jalan terbatas, kelima objek wisata dalam penelitian ini merupakan objek wisata yang cukup ramai dikunjungi pengunjung. Jumlah pengunjung pada masing-masing lokasi wisata tersebut bervariasi jumlahnya dengan rata-rata pengunjung pada setiap akhir pekan yaitu hari Sabtu – Minggu mencapai 50-100 orang. Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah pengunjung di Air Panas Hapanasan mencapai 6.781 orang, pengunjung Air Panas Suaman mencapai 13.177 orang, pengunjung Danau Sipogas mencapai 3.647 orang dan pengunjung objek wisata Batu Gajah mencapai 4.464 orang. Jumlah pengunjung pada kelima objek wisata ini cukup fluktuatif dari tahun 2021 – 2023.

Berdasarkan hasil survei di lapangan dengan wawancara pengunjung, pengelola maupun warga sekitar dan hasil olah data, diketahui bahwa objek wisata Air Panas Hapanasan merupakan objek wisata yang menempati urutan pertama dan menjadi prioritas yang harus dikembangkan baik dari segi infrastruktur, pemberdayaan komunitas lokal & UMKM maupun dalam hal promosi objek wisatanya. Selanjutnya pada urutan kedua dalam prioritas pengembangan objek wisata adalah Batu Gajah, urutan ketiga adalah Air Terjun Sipogas, urutan keempat adalah Air Panas Suaman dan yang terakhir adalah Danau Sipogas.

Pengembangan infrastruktur objek wisata dapat dilakukan dari

pembangunan dan perawatan objek wisata itu sendiri maupun akses jalan menuju lokasi wisata tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024, jalan di kabupaten Rokan Hulu belum semuanya terbuat dari aspal. Terdapat jalan yang masih berupa jalan kerikil bahkan jalan tanah. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa jalan di Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi oleh jalan kerikil (57,97%) dengan panjang mencapai 1.054,12 km, sedangkan jalan aspal (24,15%) sepanjang 439,08 km, jalan tanah sepanjang 280,89 km (15,45%) dan jalan lainnya (2,43%) sepanjang 44,19 km.

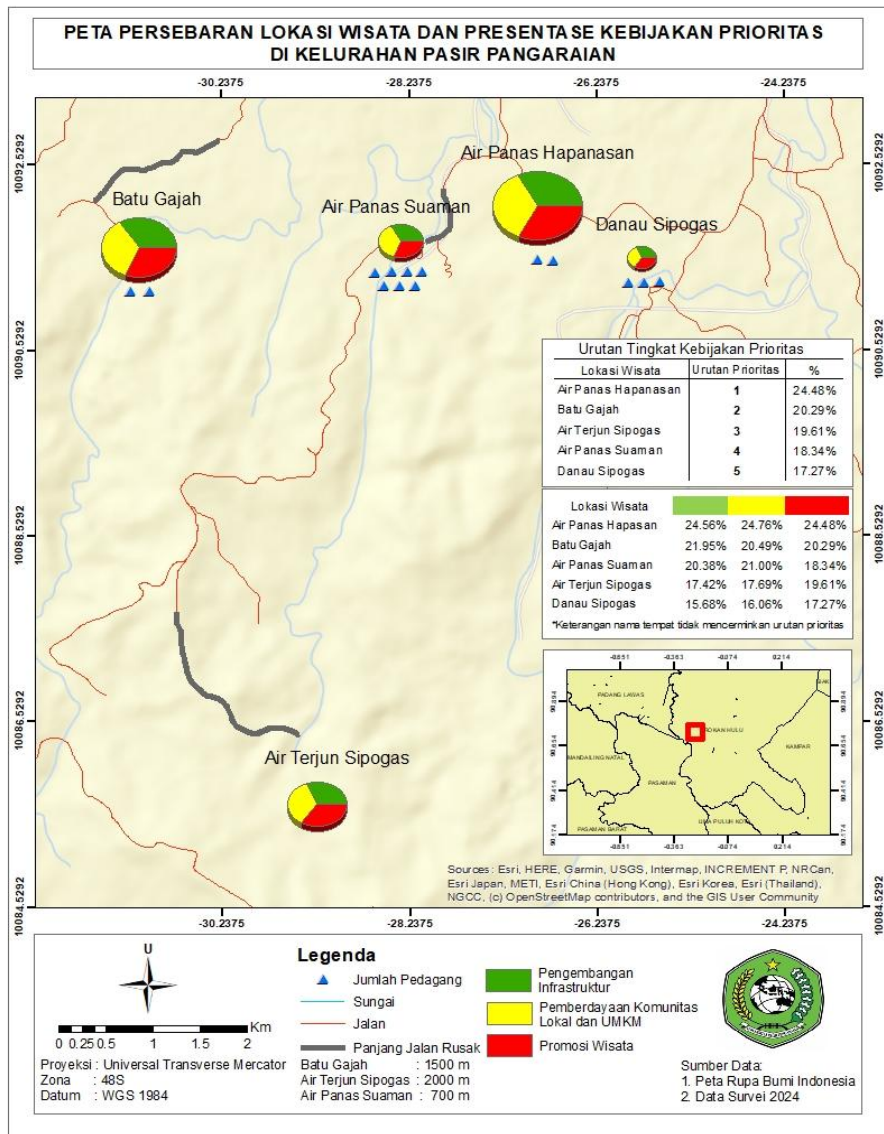
Dalam pengembangan infrastruktur jalan tentunya selain melihat jenis jalan juga perlu memperhatikan kondisi jalan yang sudah ada apakah perlu diperbaiki karena adanya jalan yang rusak atau berlubang. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa kondisi jalan di Rokan Hulu bervariasi mulai dari yang baik hingga sangat rusak. Terdapat jalan dengan kondisi baik (18,66%) yaitu sepanjang 339,37 km, jalan dengan kondisi sedang (20,72%) sepanjang 376,74 km, jalan dengan kondisi rusak (29,77%) sepanjang 541,22 km dan jalan dengan kondisi sangat rusak (30,85%) sepanjang 560,95 km. Di sekitar lokasi kelima objek wisata ini juga terdapat beberapa jalan dengan kondisi rusak yaitu di jalan menuju objek wisata Batu Gajah dengan jalan yang rusak sepanjang 1.5 km, jalan menuju Air Terjun Sipogas sepanjang 2 km dan jalan menuju Air Panas Suaman 0.7 km.

Berdasarkan data jenis jalan dan kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu dapat diketahui bahwa pengembangan infrastuktur jalan sangatlah penting dilakukan untuk menunjang pengembangan lokasi wisata. Dengan akses yang mudah dan nyaman maka wisatawan akan lebih tertarik untuk berkunjung ke berbagai objek wisata di Kabupaten Rokan Hulu terutama di Air Panas Hapanasan, Batu Gajah, Danau

Sipogas dan Air Panas Suaman, dan Air Terjun Sipogas.

Pemberdayaan komunitas lokal dan UMKM juga menjadi hal penting dalam pengembangan suatu objek wisata. Mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam mengembangkan objek wisata menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata didistribusikan di antara anggota masyarakat. Pengembangan UMKM untuk mendukung kegiatan wisata dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang meningkatkan pengalaman wisatawan seperti menyediakan makanan minuman atau jasa yang sekiranya dibutuhkan oleh pengunjung seperti jasa foto. Semakin bervariasi jenis-jenis UMKM yang ada di lokasi wisata tentunya juga akan lebih menarik bagi pengunjung karena selain merasakan pengalaman berwisata juga mendapatkan pengalaman yang unik dari berbagai jenis UMKM yang dapat dicoba. Akan tetapi saat ini keberadaan UMKM khususnya pedagang yang ada di kelima objek wisata masih sangat sedikit. Hanya terdapat 2 warung yang ada di objek wisata Air Panas Hapanasan, 7 warung di objek wisata Air Panas Suaman, 2 warung di objek wisata Danau Cipogas dan 2 warung di objek wisata Batu Gajah.

Faktor utama lain dalam mengembangkan objek wisata adalah faktor promosi objek wisata. Semakin banyak pihak yang mengetahui keberadaan dan potensi suatu objek wisata maka diharapkan akan adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung. Promosi objek wisata saat ini dapat dengan mudah dilakukan dengan adanya teknologi dan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Selain bertujuan menarik minat pengunjung, dengan adanya promosi diharapkan akan timbulnya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang melihat potensi objek wisata yang dapat dikembangkan lebih baik lagi.



Gambar 4. 4 Peta Persebaran Lokasi Wisata

Untuk selanjutnya mengenai data ini juga disajikan dalam bentuk video yang dapat diperoleh dari pengambilan data aerial melalui drone maka diperoleh visualisasi berupa videographic yang sebagai berikut (link: <https://s.id/29cab>) yang terlihat pada Gambar 4.5 dibawah ini:



Gambar 4. 5 Visualisasi Data Aerial

Sedangkan dari pengambilan data aerial melalui drone maka diperoleh visualisasi berupa videographic yang sebagai berikut (link: <https://s.id/29c9n>) yang terlihat pada Gambar 4.6 dibawah ini:



Gambar 4. 6 Visualisasi Data Aerial

Sedangkan dari pengambilan data aerial melalui drone maka diperoleh visualisasi berupa videographic yang sebagai berikut (link: <https://s.id/29c9R>) yang terlihat pada Gambar 4.7



Gambar 4. 7 Visualisasi Data Aerial

Sedangkan dari pengambilan data aerial melalui drone maka diperoleh visualisasi berupa videographic yang sebagai berikut (link: <https://s.id/29c9d>) yang terlihat pada Gambar 4.8 di bawah ini:



Gambar 4. 8 Visualisasi Data Aerial

Sedangkan dari pengambilan data aerial melalui drone maka diperoleh visualisasi berupa videographic yang sebagai berikut (link: <https://s.id/294wF>) yang terlihat pada Gambar 4.9 di bawah ini:



Gambar 4. 9 Visualisasi Data Aerial

BAB V

Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Wisata Berbasis Komunitas

CBT dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat UMKM di Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya. Dengan impementasi yang tepat, CBT dapat membantu UMKM Untuk meningkatkan pendapatan, akses pasar, dan ketrampilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Beberapa hal yang direkomendasikan dari hasil kajian ini, diantaranya:

5.1 Pengembangan Infrastruktur Wisata yang Inklusif

Pembangunan infrastruktur yang merata dan inklusif menjadi fondasi utama dalam mendukung pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, infrastruktur yang tidak memadai di Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya menjadi kendala utama dalam menjangkau destinasi wisata perairan yang potensial. Oleh karena itu, diperlukan prioritas kebijakan dalam bentuk peningkatan akses jalan, perbaikan sarana publik, dan penyediaan fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, serta ruang interaksi sosial yang representatif.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan infrastruktur wisata yang inklusif. Infrastruktur tidak hanya menjadi sarana fisik penunjang mobilitas wisatawan, tetapi juga instrumen pemerataan manfaat ekonomi dan sosial. Untuk itu, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain (1) Penyederhanaan Regulasi: Proses perizinan yang efisien

dan birokrasi yang minimal akan mendorong pertumbuhan UMKM, sekaligus mempercepat pembangunan sarana wisata yang mendukung komunitas lokal. (2) Dukungan Finansial: Pemerintah perlu menyediakan skema pembiayaan dengan bunga rendah dan aksesibilitas tinggi, khususnya untuk UMKM di kawasan pedesaan. Fasilitas ini akan memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam melakukan investasi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan wisata. (3) Pembangunan Infrastruktur Hijau: Pembangunan fasilitas wisata harus mengadopsi prinsip ramah lingkungan, seperti penyediaan jalur setapak, fasilitas pengelolaan limbah, dan sistem transportasi rendah emisi. Infrastruktur hijau tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat daya tarik wisata berbasis alam.

5.2 Penguatan UMKM dan Kewirausahaan Lokal

UMKM di sektor pariwisata memiliki peran vital sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus penjaga warisan budaya dan kearifan lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa UMKM di desa wisata masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan modal, inovasi produk, dan akses pasar. Untuk itu, strategi penguatan UMKM harus difokuskan pada tiga aspek utama: (1) penyediaan pelatihan keterampilan dan manajerial, (2) dukungan pembiayaan berbasis mikro dan inkubasi bisnis, serta (3) integrasi UMKM dalam rantai nilai pariwisata melalui platform digital dan jejaring pasar. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi aktor sentral dalam ekosistem pariwisata berbasis komunitas. Selain itu pelaku UMKM perlu berinovasi terhadap (1) Produk dan Layanan: UMKM perlu mengembangkan produk-produk kreatif, autentik, dan ramah lingkungan yang mencerminkan karakteristik lokal. Produk seperti kerajinan tangan, kuliner khas, dan jasa ekowisata dapat menjadi unggulan yang diminati wisatawan. (2) Pemanfaatan Teknologi Digital:

Transformasi digital menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pasar. UMKM diharapkan memanfaatkan platform digital, seperti e-commerce dan media sosial, untuk promosi dan transaksi produk secara efisien. (3) Kolaborasi dan Kemitraan: Penguatan jejaring dengan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal akan memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem Community-Based Tourism (CBT) dan memperbesar dampak ekonomi secara kolektif.

5.3 Keterlibatan Multistakeholder dalam Pengelolaan Destinasi

Penerapan *Community-Based Tourism* tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, masyarakat lokal, pelaku UMKM, akademisi, serta investor perlu duduk bersama dalam forum kolaboratif untuk menyusun agenda pembangunan wisata yang adil, berkelanjutan, dan partisipatif. Kegiatan seperti *Focus Group Discussion* (FGD), musyawarah desa wisata, dan penguatan lembaga desa menjadi instrumen penting dalam mengonsolidasikan aspirasi dan merancang tata kelola wisata yang berbasis nilai inklusi dan akuntabilitas. Mekanisme pelibatan yang berkelanjutan akan mendorong rasa memiliki dari komunitas sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

5.4 Roadmap Menuju Pariwisata Berbasis Komunitas Berkelanjutan

Penyusunan peta jalan (*roadmap*) pembangunan pariwisata berbasis komunitas perlu dirancang dalam kerangka waktu dan tahapan yang realistis, sebagai panduan implementasi kebijakan dan pengembangan lapangan yang merepresentasikan tahapan pengembangan pariwisata berbasis komunitas menuju keberlanjutan. Adapun roadmap tersebut dapat dibagi ke dalam tiga fase utama. (1) Jangka pendek: pemetaan potensi wisata dan UMKM, identifikasi

kelembagaan lokal, peningkatan kapasitas masyarakat. (2) Jangka menengah: revitalisasi infrastruktur dasar, digitalisasi promosi wisata, integrasi UMKM dalam rantai pasok. (3) Jangka panjang: pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pariwisata, sertifikasi destinasi hijau, serta monitoring dan evaluasi berbasis data partisipatif. Dengan roadmap yang terstruktur dan kontekstual, Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya dapat menjadi model praktik terbaik pengembangan destinasi berbasis komunitas yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. K. Kar, S. K. Choudhary, and P. V. Ilavarasan. 2023. "How can we improve tourism service experiences: insights from multi-stakeholders' interaction," *Decision*, vol. 50, no. 1, pp. 73–89
- Ahsani R, Suyaningsih O, Ma'rifah N, Aerani E. 2018. Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 3(2), 135-146
- Angelina RS. 019. Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Perkebunan Karet ke Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Koto Tinggi Kabupaten Rokan Hulu Provinsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa STKIP Ahlussunnah*, Vol 1(2)
- Bisri, B., Fitra, S., Widyastuti, T., & Aria, R. R. 2024. Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *JiIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 6052–6054
- Burhanuddin, Ilman, A. H., & Cita, F. P. 2020. Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2001-2016. *Nusantara Journal of Economics (NJE)*, 02(01), 25–37
- Cornellia AH. 2023. Pengembangan Strategi Marketing UMKM dan Atraksi Wisata Desa Wisata Tepus Gunungkidul. *Jurnal Abdimas Pariwisata*. Vol 4(1).
- Creswell JW, Poth CN. 2016. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among 5 Approaches*. Sage Publ. pp. 778.
- D. J. Telfer and R. Sharpley. 2015. *Tourism and Development in the Developing World (2nd ed.)*. Routledge
- Dolezal C, Novelli M. 2020. Power In Community-Based Tourism: Empowerment and Partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*
- Evi Sirait, Bagus Hari Sugiharto, Jenal Abidin, Nely Salu Padang, Johni Eka Putra. 2024. Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5(7), 3816-3829.

- Ersa YS. 2022. Kajian Pengaruh Jalan Tol Dumai-pekanbaru Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Dumai
- F. Manzoor, L. Wei, and N. Sahito. 2021. "The role of SMEs in rural development: Access of SMEs to finance as a mediator," *PLoS One*, vol. 16, no. 3 pp. 1–18
- Falatehan AF. 2016. Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah.
- Febriandhika I, Kurniawan T. 2019. Membingkai Konsep Pariwisata yang Berkelanjutan Melalui *Community-Based Tourism*. *Journal of Public Sector Innovations*. Vol. 3(50)
- Febriyantoro MT, Arisandi D. 2018. Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Manajemen Dewantara*. Vol. 1(2), 62-76
- Friedman J. 1992. Empowerment The politics of an alternative development. Oxford: Basil Blackwell. xii+196 pp. ISBN: 1 557 86300 8.
- Giampiccoli A, Saayman M. 2018. Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*. Vol. 7 (4) ISSN: 2223-814X
- H. Han, T. Eom, A. Al-Ansi, H. B. Ryu, and W. Kim. 2019. "Community-based tourism as a sustainable direction in destination development: An empirical examination of visitor behaviors," *Sustain.*, vol. 11, no. 10
- Hapsari A., Kinseng RA. 2018. Hubungan Partisipasi dalam Program Pemberdayaan Umkm Dengan Tingkat Kesejahteraan Peserta. Vol. 2(1): 1-12.
- Hariani, P., & Silvia, E. 2014. Analisis Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Ekonomikawan (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan)*, Vol. 15(1), 16–36.
- Hasanah M, Satrianto A. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Ke Objek Wisata Komersial Di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*. Vol. (3), 931.
- Hausler, N. 2005. Planning for Community Based Tourism –A Complex and Challenging Task. *The International Ecotourism*

- Society.
- Hayati, Nur., Rosdiana, Weni. 2016. Proses Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Kemitraan pada PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk.
- Hulu, P. K., & Wahyuni, K. T. 2021. Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2010-2019. Seminar Nasional Official Statistics, Vol.(1), 603–612.
- Hutauruk Sony Piter Rapat. 2021. Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3(1), 24–37.
- Indra Rina, Veriansyah I. 2022. Analisis Objek Wisata Riam Pangar Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang. *Geo Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata*. Vol. 2(3), 1–14.
- Irwan Sukmawan, Ferdiansyah Nugraha Putra, Ali Fajri, Kisti Aprianti Purnama, Siti Laelatul Hamdiah, Siti Sumiati Dewi. 2021. PKM Pengembangan Community Based Tourism Di Desa Sukacai Kabupaten Serang Banten. Vol. 1(3).
- K. M. Haywood. 1988. “Responsible and Responsive Tourism Planning in The Community,” *Tour. Manag.*, vol. 9, no. 2, pp. 105–118
- Kiwang A, Arif F. 2020. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Akibat Pembangunan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*. Vol. 5(87).
- L. A. de Abreu, M. da C. Walkowski, A. R. C. Perinotto, and J. F. da Fonseca 2024. “Community-Based Tourism and Best Practices with the Sustainable Development Goals,” *Adm. Sci.*, vol. 14, no. 2.
- Lianna, L. D. R. D., Muzdalifah, & Muhammad Anshar. 2020. Pengaruh Infrastruktur terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2018. Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1(7), pp 328–334.
- Lion H, Donovan JD, Bedggood RE. 2013. Environmental Impact Assessments from a Business Perspective: Extending Knowledge and Guiding Business Practice. *J Bus Ethics*. Vol. 117(4):789–805.
- M. H. Hanafiah, M. R. Jamaluddin, and M. I. Zulkifly. 2013. “Local

- Community Attitude and Support Towards Tourism Development in Tioman Island, Malaysia,” *Procedia-Social Behav. Sci.*, vol. 105, pp. 792–800
- Ma’ruf, Y. P., Daud, J. 2013. Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknik Sipil USU*, 2(3), 1–13.
- Mega Lestari, Suhadak. 2019. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Ekonomi Indonesia (Studi Pada Badan Pusat Statistik Tahun 2003- 2017). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 70 No. 1
- Miles MB, Huberman AM. 2014. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: UI Press
- Muallisin, Isnaini. 2007. Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta Edisi No.2*
- Murshed M. 2022. The impacts of fuel exports on sustainable economic growth: The importance of controlling environmental pollution in Saudi Arabia. *Energy Reports*. Vol. 8:13708–22
- Oos M. Anwas. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global EDISI. Bandung : Alfabeta. xii+212 hlm. ISBN: 9786027825420.
- Pamularsih T. 2021. Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam di Desa Abangsongan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*. Vol. 5(1), 46–54.
- Piartirini Putu. 2018. The Relationship Among Community Based Tourism Application, Community Attitude, Community Empowerment and Community Life Satisfaction. *E-Journal of Tourism*.
- Pranaka AMW, Moejato. 1996. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta (ID): CSIS.
- Prajanti DWS. 2014. Strategy for controlling agricultural land conversion of paddy by using analytical hierarchy process in Central Java. *Manag Environ Qual An Int*. Vol. 25: 631–647
- Putri CS, Malik U. 2020. Analisa kedalaman air panas menggunakan metode geolistrik konfigurasi Schlumberger di objek wisata Air Panas Pawan. *Komunikasi Fisika Indonesia*. Vol.17(2):87-91.
- Ratwianingsih L, Mulyaningsih T, Johadi J. 2021. Analisis Potensi dan

- Upaya Pengembangan Desa Wisata Alam Kepuhsari Manyaran Wonogiri. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan* [Internet]. Vol.3(1), 25–30.
- Rahayu, Y., Soleh, A. 2017. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Pendekatan Fungsi Cobb Douglas). *Journal Development*, 5(2), 125–139.
- Rahayu HC, Purwantoro, Wibowo M, Safitri J, Supardjito. 2022. Determinants of Welfare for the Elderly Population in Indonesia. *The International Conference of Medicine and Health (ICMEDH) KnE Medicine*. Pp 782–793.
- Rahayu HC, Sarungu JJ, Hakim, Lukman, Soesilo. AM. 2018. Dimensi Kemiskinan di Wilayah Pesisir Pada Kabupaten Indragiri Propinsi Riau. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14, (1), 21-29
- Rahayu HC, Handri. 2023. Influence Of Enviromental Quality for Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*. Vol. 9(1), 98-111.
- Rahayu HC, Hakim L. 2017. Aspek Infrastruktur dan Geografi dalam Kemiskinan Propinsi Riau: Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) pada Tahun 2003 – 2014. *Proceeding International Conference On Ethnicity and Globalization*, pp 136.
- Rahayu HC, Purwantoro, Setyowati E. 2021. *Measuring the Effect of Inequality and Human Resource Indicators to Poverty Density in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 22 (2), 153-160.
- Riandy Mardhika Adif, Rifki Hendri, Almizan. 2021. Analisis Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi UMKM di Bukit Gado-Gado Kota Padang. Vol. 3(4)
- Rijali A. 2019. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol.17(33), 81.
- Rismawati, Sitepu ES. 2021. The Influence of Service Quality, Destination Image, and Memorable Experience on Revisit Intention with Intervening Variables Tourist Satisfaction. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events* . Vol. 5(1). 77-87.

- Rusdi, M. K., Manaf, M., Salim, A. 2020. Pengaruh Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Cenrana-Labotto Terhadap Perekonomian Masyarakat Studi Kasus: Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. *Urban and Regional Studies Journal*. Vol. 2(1), 25–30.
- S. Snyman. 2016. “Strategic Community Participation in Sustainable Tourism BT - Reframing Sustainable Tourism,” in *Environmental Challenges and Solutions*, S. F. McCool and K. Bosak, Eds. Dordrecht: Springer Netherlands. pp. 65–80.
- Sidahuruk R, Sulistyono D. 2022. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Wisata Danau Toba. *Jurnal Gerbang Riset Inovasi*. Vol. 1(1).
- Sihombing, A. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pertanian dan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*. Vol. 8(2), 1–10
- Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook* . Thailand: REST Project
- Sulistiyani AT. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta (ID): Gava Media
- Sulistiyono SW. 2021. Analisis Pergeseran Kegiatan Ekonomi Jawa Timur Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*. Vol. 5(2), 382-392.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Reika Aditama.
- Sutrisno E. 2021. Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Parawisata. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9(1), 20.
- Syarif E, Zhiddiq S, Falah D. 2023. Community Based Tourism Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Di Taman Wisata Alam Nasional Batimurung Maros Sulawesi Selatan Indonesia. *Jurnal Environmental Science* . Vol. 6(1).
- T. L. Saaty. 2008. “Decision making with the analytic hierarchy process,” *Int. J. Serv. Sci.*, Vol. 1, No. 1, pp. 83–98
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

- Wibowo, A. 2016. Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2006 - 2013. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–135.
- Wibowo MS, Belia LA. 2023. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*. Vol. 6(1).
- Wulandari C. 2023. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pengembangan Community Base Ecotourism di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*. Vol.2(2): 132-145

COMMUNITY-BASED TOURISM MODEL

Strategi Pemberdayaan UMKM dan Pembangunan
Infrastruktur untuk Pariwisata Berkelanjutan

Buku ini menyajikan pendekatan strategis dalam membangun pariwisata berkelanjutan melalui sinergi antara pemberdayaan UMKM dan pengembangan infrastruktur berbasis model Community-Based Tourism (CBT). Berlandaskan hasil kajian mendalam di Desa Pawan dan Desa Sialang Jaya, buku ini menyoroti bagaimana masyarakat lokal dapat menjadi aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata, tanpa harus kehilangan identitas budaya dan lingkungan hidup mereka. Dengan metodologi analisis hierarki (AHP) dan pendekatan data lapangan, buku ini memetakan prioritas kebijakan, strategi pembangunan berbasis komunitas, dan potensi optimalisasi UMKM lokal. Tidak hanya menawarkan kerangka konseptual yang kuat, buku ini juga dilengkapi dengan rekomendasi praktis yang dapat dijadikan rujukan oleh akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga komunitas lokal yang tengah mengembangkan desa wisata. Melalui penguatan koneksi antara infrastruktur inklusif, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan tata kelola kolaboratif, buku ini hadir sebagai referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami dan menerapkan praktik pariwisata yang berkeadilan, lestari, dan berpihak pada masyarakat.



PENERBIT CV. Dalni Bintang
Petakur Atas, Sukadamai
Kec. Ujungbatu, Kab. Rokan Hulu
Provinsi Riau.
<https://dalnibintangpublisher.com>

